

KEBIJAKAN PRESIDEN DONALD TRUMP MENGAKUI YERUSALEM MENJADI IBU KOTA ISRAEL

Oleh: Jovita Paulina Sibarani

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel.

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pada tahun 2017, Presiden Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang menjadi tonggak perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik Israel dan Palestina. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut, dengan memberikan perhatian khusus pada pengaruh kelompok lobi utama seperti AIPAC dan kelompok Kristen Evangelikal dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan politik domestik dan kepentingan kelompok lobi memiliki pengaruh besar dalam keputusan pengakuan Yerusalem, yang tidak hanya berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga menyulut reaksi internasional dalam proyeksi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kasus ini didorong oleh kalkulasi politik domestik dan tekanan kelompok kepentingan daripada pertimbangan hukum internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, AIPAC, Kelompok Kristen Evangelikal, Kelompok Lobi Politik, Konflik Israel dan Palestina.

ABSTRACT

In 2017, President Donald Trump officially recognized Jerusalem as the capital of Israel and relocated the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, marking a major turning point in the direction of U.S. foreign policy regarding the Israeli-Palestinian conflict. This research focuses on analyzing the underlying factors behind this decision, with particular attention to the influence of major lobbying groups such as AIPAC and Evangelical Christian groups in the formulation of U.S. foreign policy. The findings of this research indicate that domestic political motivations and the interests of lobbying groups played a significant role in the decision to recognize Jerusalem, which not only affected U.S - Israeli relations but also sparked international reactions regarding prospects for peace in the Middle East. The conclusion of this study asserts that U.S. foreign policy in this case was driven more by domestic political calculations and pressure from interest groups than by consideration of international law.

Keywords: *United States Foreign Policy, AIPAC, Evangelical Christian Groups, Political Lobbying Groups, Israeli-Palestinian Conflict.*

A. PENDAHULUAN

Yerusalem merupakan salah satu kota di kawasan Timur Tengah yang menjadi kota dengan status internasional yang kompleks karena telah menjadi kota sejarah yang dikendalikan oleh berbagai kekuatan di berbagai zaman serta menjadi pusat berbagai aliran kepercayaan hingga pada saat ini,¹ dan semakin rumit sejak terjadinya aneksasi yang dilakukan oleh Israel atas Yerusalem Timur di tahun 1967 yang kemudian menjadikan kota Yerusalem sebagai arena politik internasional yang kontroversial karena telah diperebutkan sepanjang sejarah.

Pasca terjadinya aneksasi yang dilakukan oleh Israel di Yerusalem Timur dalam perang Enam Hari tahun 1967, Israel mengklaim bahwa kegiatan pemerintahan negara mereka ada di seluruh kota Yerusalem yang menjadikan anggapan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel.² Namun pengakuan ini ditentang oleh komunitas internasional yang tidak bersedia mengakui bahwa Yerusalem menjadi ibu kota dari Israel.³ Penentangan ini ditunjukkan dengan bagaimana negara-negara, termasuk Amerika Serikat, memposisikan

kedutaan besarnya di Tel Aviv bukan di Yerusalem.

Pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat meloloskan sebuah undang-undang yang dinamakan "*Jerusalem Embassy Act*" yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan pemindahan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.⁴ Undang-undang tersebut sejak masa pemerintahan presiden Clinton sampai dengan presiden Obama selalu ditunda karena penandatanganan undang-undang tersebut dapat berpotensi merusak upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.⁵

Setelah tertunda selama 22 tahun, pada tanggal 6 Desember 2017, pemerintahan Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Amerika Serikat juga menyampaikan rencana untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai langkah konkret dari pengakuan tersebut. pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Trump dalam pidato kenegaraan di Gedung Putih dan dituangkan dalam sebuah teks proklamasi resmi.⁶

Pemindahan dan pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem dilaksanakan pada 14 Mei 2018 bertepatan dengan hari jadi

¹ Faruk Hadžić, "Space and Place of Jerusalem; Sociology of Religion and Inter-Cultural Sociopolitical Peace and Conflict." *Journal of Islamic Jerusalem Studies* 22, no.1 (July 2022), hal. 48. <https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.1036835>.

² Terry Rempel, "The Significance of Israel's Partial Annexation of East Jerusalem." *The Middle East Journal* (1997).

³ *The Status of Jerusalem*, prepared under the guidance of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (New York: United Nations, 1997).

⁴ Library of Congress, *Jerusalem Embassy Act of 1995*, Public Law 104-45, 109 Stat. 398-401 (8 November 1995).

⁵ Shlomo Slonim dan Geoffrey Watson, *Jerusalem's Status and the Evolution of U.S. Policy* (Washington, D.C: The Washington Institute for Near East Policy, 1997).

⁶ U.S. Department of State, "Recognizing Jerusalem As Israel's Capital," 7 Desember 2017, diakses pada 11 September 2024, [Recognizing Jerusalem as Israel's Capital - United States Department of State](https://www.state.gov/recognizing-jerusalem-as-israel-s-capital/)

negara Israel ke-70 tahun⁷ yang di hadiri oleh 33 negara meskipun mereka tidak ikut memindahkan kedutaan besar mereka disana⁸ seperti Rumania, Austria, dan Hungaria.

Pembuatan kebijakan ini merupakan janji kampanye yang digaungkan Trump untuk mendapatkan kursi kepresidenan. Pada masa kampanyenya di tahun 2016, Trump melakukan pendekatan kepada AIPAC dan Kristen Evangelikal melalui kegiatan kampanyenya untuk memenangkan suara mutlak. Hal ini terlihat dari pidato Trump di konferensi tahunan AIPAC⁹ dan kampanyenya kepada kelompok Kristen Evangelikal.¹⁰¹¹ Dengan memberikan janji kampanye untuk menyelamatkan Israel, Trump mendapat dukungan dari kedua kelompok tersebut dan tentunya Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45 dengan

⁷ U.S. Mission Israel, "Opening of U.S. Embassy Jerusalem," U.S. Embassy in Israel, 23 Februari 2018, diakses pada 20 September 2024, [Opening of U.S. Embassy Jerusalem - U.S. Embassy in Israel](#)

⁸ Al Jazeera, "World Leaders React to US Embassy Relocation to Jerusalem," 14 Mei 2018, diakses 20 September 2024, [World leaders react to US embassy relocation to Jerusalem | Donald Trump News | Al Jazeera](#)

⁹ JTA, "Donald Trump's Full Speech to AIPAC," *The Times of Israel*, 21 Maret 2016, diakses pada 24 September 2024, [Full text of Donald Trump's speech to AIPAC | The Times of Israel](#)

¹⁰J. D. Lemons, "The Room Where It Happened: How Evangelical Leaders Used a Closed-Door Meeting to Change Sentiment for Donald Trump J. Trump," *The Australian Journal of Anthropology* 33, no.3 (2022).

¹¹ Michael Crowley, "Full text: Trump Values Voter Summit Remarks," *Politico*, 9 September 2016, diakses pada 24 September 2024, [Full text: Trump Values Voter Summit remarks - POLITICO](#)

Kristen Evangelikal dan lobi AIPAC sebagai basis pemilihnya.

Pernyataan dan perlakuan yang dilakukan Amerika Serikat tentunya menimbulkan berbagai respon dan protes dari internasional, terutama Palestina melalui Hamas melakukan aksi protes selama tiga hari dan memandang bahwa kebijakan sepihak yang dilakukan Amerika Serikat atas Yerusalem ini merugikan Palestina dan akan mengancam keamanan politik Palestina terkait kemerdekaan negara mereka, dan Yordania juga merespon dengan akan mengancam untuk menggagalkan inisiatif perdamaian yang akan diusung Amerika Serikat selanjutnya.¹²

Melalui langkah sepihak Amerika Serikat ini mengakibatkan timbulnya persepsi keberpihakan Amerika Serikat atas Israel yang berpotensi menghambat proses perdamaian dan sekaligus merusak kepercayaan internasional atas kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator netral dan penegak hukum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan Amerika Serikat mengakui pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv menjadi Yerusalem, mengetahui hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel, serta mengkaji model pemerintahan Donald Trump.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini

¹² James M. Lindsay, "What's At Stake With The U.S. Recognition Of Jerusalem," *Council on Foreign Relations*, diakses pada 24 September 2024, [What's At Stake With the U.S. Recognition of Jerusalem | Council on Foreign Relations \(cfr.org\)](#)

menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif-analitis. Penelitian ini berusaha mencari jawaban dari bagaimana pemerintahan Donald Trump dan pengaruhnya dalam politik global serta menjelaskan bagaimana kepemimpinan Donald Trump dan birokrasi Amerika Serikat saling mempengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dengan Strategi pencarian basis data elektronik, *handsearching*, internet dengan seleksi studi melalui analisis dokumen yang membantu penulis untuk mencapai kesimpulan yang pasti dapat di ambil.

Menurut Bagong Suyanto dan Satinah penelitian kualitatif sebagaimana diartikan merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tulisan serta Perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti¹³.

Salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah studi literatur dimana sumber resmi yang dilengkapi dengan informasi faktual dan otentik mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur dengan model analisis dokumen.¹⁴ Bahan dan informasi yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data penelitian studi kepustakaan yang diperoleh dan diolah dari berbagai sumber, buku, jurnal, dan berita. bahan-bahan yang

diperoleh akan diolah dan digabungkan kemudian digunakan untuk melengkapi dan memperjelas penelitian ini.

Dibutuhkan tentunya di dalam suatu penelitian sebuah ruang lingkup yang digunakan sebagai atasan dan fokus terhadap fenomena yang diteliti. Diperlukannya batasan dalam penelitian bertujuan untuk mudahnya akses peneliti dalam mencari sumber data, pengelolaan dan menganalisa data dengan teori penelitian yang telah ditentukan dapat diselesaikan secara maksimal dan tepat sasaran. Untuk memfokuskan dan memperjelas tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada kepemimpinan Donald trump yang dengan berani mengeluarkan pernyataan pengakuan atas pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv menjadi Yerusalem.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hubungan Amerika Serikat dengan Israel

Hubungan Amerika Serikat dan Israel bermula sejak tahun 1948, dimana pada saat itu Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Harry Truman, menjadi negara pertama di dunia yang mengakui secara *de facto* Israel sebagai negara merdeka tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Israel dikumandangka¹⁵

Kebijakan yang dikeluarkan Truman untuk mengakui Israel sebagai negara ini beralaskan strategi misi Amerika Serikat untuk

¹³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (2005).

¹⁴ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Quantitative Research Method," *Quantitative Research Journal* 9, no.2 (2009).

¹⁵ Truman Presidential Museum & Library, "Recognition of Israel," *National Archives and Records Administration*, diakses pada 23 November 2024, [Recognition of Israel | Harry S. Truman](#)

mendapat perhatian negara-negara Timur Tengah. Terdapat 8 motivasi luas Amerika Serikat menarik perhatian negara di kawasan Timur Tengah; yakni dengan memastikan stabilitas di kawasan tersebut setelah penarikan pengaruh Inggris, menangkal pengaruh perluasan ideologi yang dibawa Uni Soviet, mengawal stabilitas politik negara-negara muslim, mengambil posisi dalam konflik Palestina, melakukan pembatasan dan pengaliran bantuan militer di kawasan tersebut, mengawasi alur perdagangan, mempengaruhi pengaliran minyak yang ada di kawasan tersebut, dan menjaga keamanan dan kedaulatan Israel.¹⁶ Dengan demikian, membangun kredibilitas di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu strategi penting Amerika Serikat di tengah Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Pemimpin Amerika Serikat setelah era kepemimpinan Presiden Truman tidak lagi mengusung misi yang selaras dengan kepentingan yang diperjuangkan oleh Presiden Truman. Para pemimpin tersebut lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang mereka hadapi dibanding dengan membantu permasalahan Israel di kawasannya. Namun, berbagai bantuan terutama bantuan persenjataan yang diberikan Amerika Serikat dan masih terus memantau dengan skeptis perkembangan kekuatan negara tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para pemimpin

Amerika Serikat kala itu kemudian berubah haluan setelah terjadinya Perang Enam Hari, dimana melalui perang tersebut Israel telah menunjukkan kekuatan dan efektivitas mereka di bidang militer dan dinilai unggul dikawasan tersebut sehingga karena hal tersebut terdapat perspektif baru yang dihadirkan oleh Israel terhadap Amerika Serikat karena dianggap memiliki potensi memberikan keuntungan bagi kepentingan Amerika Serikat terutama kepentingan mereka di Timur Tengah dan melawan pengaruh Uni Soviet.

Amerika Serikat telah memandang Israel sebagai mitra yang tepat dalam menjaga keamanan dan stabilitas kekuatan di Timur Tengah setelah kekalahan telak negara-negara Arab yang menciptakan skeptis bagi Amerika Serikat dalam menilai kredibilitas mereka dalam menjaga stabilitas regional.

Hubungan Ekonomi Amerika Serikat dengan Israel

Sejak kemerdekaan Israel di tahun 1948, hubungan bilateral yang terjalin di tengah Amerika Serikat dan Israel mengalami perkembangan besar yang bermula dari dukungan politik menjadi sebuah kemitraan yang memiliki keuntungan strategis bagi kedua negara secara intim. Hubungan tersebut berkembang dengan pesat dan menjadi kemitraan yang terikat secara strategis dalam masa jangka panjang. Amerika Serikat secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi untuk mendorong Israel mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan mereka. Tercatat sejak tahun 1949 Israel telah menerima bantuan

¹⁶ Kenneth W. Stein, *US-Israeli Relations 1947-2010: The View from Washington, in The World Facing Israel-Israel Facing the World: Images and Politics* (Berlin: Frank and Timme, 2011).

ekonomi dari Amerika Serikat sebesar \$210 juta per tahunnya dalam bentuk pinjaman bank ekspor-impor, hibah, dan pangan.¹⁷

Bentuk hubungan lainnya di sektor ekonomi antara Amerika Serikat dan Israel adalah penandatanganan *Free Trade Agreement*¹⁸ di tahun 1985 yang menjadikan hambatan tarif perdagangan dan seluruh tarif bea cukai antara Amerika Serikat dengan Israel ditiadakan yang tentunya ini menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar Israel karena mendorong peningkatan volume perdagangan yang signifikan di bidang ekspor dan impor sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga akibat perjanjian ini.¹⁹

Terdapat juga kerja sama di sektor energi yang dilakukan Departemen Energi Amerika Serikat dan Kementerian Infrastruktur Israel yang diikat dengan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2000. Kerja sama ini menyangkut pertukaran informasi ilmiah dan teknis mengenai hasil dan penelitian serta pengembangan secara berkala di sektor energi.²⁰

¹⁷ MIFTAH, "The controversy for US foreign aid to Israel, 20 Mei 2002, diakses pada 27 November 2024, [MIFTAH - US foreign aid to Israel](#)

¹⁸ *Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Government of Israel and the Government of the United States of America*, berlaku tanggal 19 Agustus 1988, Article 1, United States Trade Representative.

¹⁹ W. Charles Sawyer dan Richard L. Sprinkle, "U.S.-Israel Free Trade Area: Trade Expansion Effects of the Agreement," *Journal of World Trade* 20, no.5 (Oktober 1986).

²⁰ *Agreement Between the United States of America and Israel Concerning Energy Cooperation*, ditandatangani 22 Februari

Hubungan Militer Amerika Serikat dengan Israel

Dimulai sejak berdirinya negara Israel, terutama pada Perang Arab-Israel di tahun 1948 Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer untuk memperkuat pertahanan dalam negeri negara tersebut²¹ dan kemudian bantuan-bantuan militer ini mengalir secara terstruktur pada tahun 1962 dimana terjadi hubungan kemitraan penjualan senjata antara kedua negara tersebut.²² Sejak tahun 1948 Amerika Serikat diperkirakan telah terdapat mengeluarkan pendanaan pertahanan sekitar \$158 miliar yang diberikan kepada Israel dalam bentuk bantuan bilateral militer.²³

Kerja sama terus terjalin antara kedua negara tersebut dan pada tahun 1983 pada masa kepemimpinan Amerika Serikat Presiden Ronald Reagan dan kepemimpinan Israel Perdana Menteri Yitzhak Shamir, Amerika Serikat dan Israel membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperkuat hubungan kedua negara tersebut terutama di bidang militer dan intelijen,²⁴ yang

2000, T.I.A.S. 01-501, Department of Energy of the United States of America.

²¹ U.S. Department Of State, *Foreign Relations of the United States, 1948, the Near East, South Asia, and Africa, Volume V, Part 2* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1948).

²² Anthony H. Cordesman, *Arms Sales, Arms Control, and Regional Security in the Middle East* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2001).

²³ Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel," *Congressional Research Service, Library of Congress*, Maret 2023.

²⁴ *Memorandum of Understanding Between the Governments of the United States and Israel on Strategic Cooperation*, Israel Ministry of Foreign Affairs, 30 November 1981.

dengan demikian menandakan bahwa Israel telah menjadi mitra strategis utama Amerika Serikat dalam memperkuat kredibilitasnya di kawasan Timur Tengah. Kemitraan yang terjalin melalui MoU 1983 ini telah menjadi akar penting terhadap penguatan aliansi strategis Amerika Serikat dan Israel hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan situasi, hampir seluruh bantuan bilateral Amerika Serikat kepada Israel tersalurkan dalam bentuk bantuan militer, dibandingkan dengan masa lalu dimana Israel menerima bantuan untuk pengembangan ekonomi mereka dari Amerika Serikat.

Perhatian yang besar dari Kongres Amerika Serikat terhadap Israel telah menguntungkan Israel selama ini sebagai negara yang mendapat perhatian khusus dibanding negara lain, hal ini dikarenakan Israel dapat akses untuk melakukan penelitian dan pengembangan militer di Amerika Serikat dan melakukan pasar persenjataan militer dengan negara tersebut.²⁵

Di dalam konflik Israel dan Palestina, dukungan demi dukungan dari Amerika Serikat terus menyongsong Israel dalam konflik tersebut. Dukungan militer seperti bantuan pasokan peralatan militer dari Amerika Serikat, seperti bantuan pasokan baterai rudal *Hawk*, jaringan pertahanan aktif empat lapis Israel yang dikembangkan diantaranya terdapat *Iron Dome* sebagai pertahanan jarak pendek, *David's Sling* sebagai pertahanan jarak rendah hingga menengah, *Arrow II* sebagai pertahanan di atmosfer atas,

²⁵ Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel," *Congressional Research Service, Library of Congress*, Juni 2015.

dan *Arrow III* sebagai pertahanan di ekso atmosfer semakin memperkuat performa Israel dalam berkonflik dengan Palestina dan negara Timur Tengah lainnya.²⁶

Konflik Israel - Palestina dan Peran Amerika Serikat

Setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour, pada tahun 1919 Inggris menguasai wilayah Palestina akibat kemenangan melawan kekaisaran Utsmaniyah pada Perang Dunia I. Setelah menguasai wilayah Palestina, Inggris mengeluarkan *British Mandate for Palestine* dan diakui Liga Bangsa-Bangsa pada 16 September 1922 yang memiliki tujuan dasar untuk memberikan Palestina kekuasaan pemerintahan sendiri dan dengan semakin menjelaskan mengenai pengakuan bahwa bangsa Yahudi dapat mendirikan tanah air nasional di negara Palestina.²⁷

Karena meningkatnya konflik perebutan wilayah yang terjadi di kawasan Palestina, fenomena ini menjadi perhatian internasional dimana Majelis Umum PBB kemudian merespon konflik tersebut dengan mengeluarkan Resolusi PBB 181 pada 29 November 1947 yang didalamnya memuat rekomendasi pemisahan Mandat Inggris dan melakukan pembagian wilayah di Palestina menjadi dua negara merdeka, dimana ada negara Arab dengan batas wilayah dari Galilea, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Selatan, sedangkan negara Yahudi memiliki batas wilayah dari pesisir, Galilea Timur, dan Negev.

²⁶ Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel," *Congressional Research Service, Library of Congress*, April 2013.

²⁷ *Mandate for Palestine*, Liga Bangsa-Bangsa (1992).

Melalui pembagian wilayah ini juga dituliskan bahwa kota Yerusalem menjadi *Corpus Separatum* dibawah kendali internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁸ Dengan demikian Mandat Inggris untuk Palestina telah berakhir di tahun 1947.

Status kota Yerusalem semakin kompleks akibat penafsiran mengenai wilayah tersebut berdasarkan identitas agama. Bangsa Yahudi menginginkan kota Yerusalem akibat nubuat yang tertulis di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Allah memberikan Yerusalem kepada Bangsa Yahudi, umat pilihan Allah melalui Abraham.²⁹ Oleh karena itu, bangsa Yahudi ingin merebut dan kembali ke Yerusalem sebagai bentuk penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Yahudi.

Komunitas internasional dan juga negara memberikan perhatian yang besar terhadap sengketa wilayah antara Israel dan negara Arab terhadap wilayah Palestina yang sudah berjalan cukup lama. Amerika Serikat juga turut serta menjadi aktor perdamaian dalam konflik berkepanjangan ini, hal tersebut dapat dilihat dari komitmen Amerika Serikat dalam menciptakan penyelarasan hubungan diplomatik Israel dan Palestina dengan memberikan dukungan politik, dan mediasi di dalam upaya mereka menyatukan persepsi diantara pemimpin Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).³⁰

²⁸ *The Partition Plan*, United Nations General Assembly Resolution 181 (November 29, 1947).

²⁹ Faruk Hadžić, *Op. Cit.* hal. 48.

³⁰ Fatih Soleimani, "The Oslo Agreement: A Study of the Conflict Peace Process Arabic-

Pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Amerika Serikat di tahun 1993 memfasilitasi negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina yang berlangsung secara tertutup di Oslo, Norwegia. Negosiasi ini diinisiasi sebagai respon dari pecahnya Intifada I yang dimana masyarakat Arab Palestina menyerang pasukan Israel dan kemudian Israel memberikan serangan balik dengan menjatuhkan bom di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Negosiasi tersebut dikendalikan oleh Amerika Serikat yang didukung oleh Uni Eropa, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negosiasi ini mencapai kesepakatan yang kemudian menghasilkan perjanjian perdamaian yang dinamakan *the Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangements* atau juga disebut Perjanjian Oslo dan ditandatangani secara terbuka pada 13 September 1993 di Washington DC, Amerika Serikat.³¹

Perjanjian Oslo di dalam ketentuannya memberikan masyarakat Palestina kebebasan untuk membentuk dan mengelola pemerintahan sendiri dan menuntut Israel untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan meninggalkan Jalur Gaza dan wilayah lainnya. Perjanjian ini juga menuntut Palestina untuk mengakui kedaulatan Israel dan tidak akan kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Israel. Pembahasan mengenai status Yerusalem dan isu lainnya akan menjadi pembahasan negosiasi masa depan. Sehingga upaya perdamaian

Israel," *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020), hal. 75.

³¹ *Ibid.* Hal. 75.

yang dilakukan Amerika Serikat dicapai melalui negosiasi bertahap.³²

Berselang dua tahun dari disahkannya Perjanjian Oslo di tahun 1993, Amerika Serikat kembali menyelenggarakan Perjanjian Oslo II pada 28 September 1995. Perjanjian ini dilakukan untuk membahas mengenai pembagian wilayah Israel dan Palestina terhadap Gaza dan Tepi Barat yang dibagi menjadi tiga provinsi yang ditandai dengan A yang merupakan wilayah penuh Palestina, B yang merupakan wilayah masyarakat Palestina yang keamanannya dikendalikan oleh Israel, dan C yang merupakan wilayah penuh Israel dan juga kerja sama keamanan dimana Israel meminta jaminan keamanan dari serangan terorisme yang dilakukan Hamas.³³

Tidak berselang lama dari Perjanjian Oslo II diselenggarakan, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang untuk kebijakan luar negeri dan menjadi kontroversial adalah Undang-Undang *Jerusalem Embassy Act* 1995 yang disahkan pada 23 Oktober 1995 oleh Kongres Amerika Serikat ke-104, di bawah masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton.

Disahkannya Undang-Undang ini juga diikuti dengan penambahan *Presidential Waiver Clause*, dimana presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan maupun menanggukannya dalam batas waktu enam bulan penangguhan.³⁴ Klausul Waiver ini ditambahkan oleh Presiden Bill Clinton karena dilatarbelakangi dengan konflik Israel-Palestina yang

masih menjadi perhatian internasional untuk menemukan resolusi konflik.

Dengan mempertimbangkan dampak terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, meskipun Undang-Undang *Jerusalem Embassy Act* 1995 ini telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat, Presiden Bill Clinton menggunakan Klausul Waiver terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemotongan anggaran tersebut demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.³⁵

Pengaruh AIPAC dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat,³⁶ tertulis bahwa dalam menjamin hak rakyat Amerika Serikat, setiap warga negara dan kelompok diperbolehkan untuk mengajukan petisi berisi keluhan kepada pemerintah sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat dan hak konstitusional. Sehingga akses lobi merupakan aktivitas yang dinilai menjadi wujud dari hak individu atau kelompok untuk mengaspirasikan kepentingan pelobi terhadap pembuat kebijakan. Hal ini menjadikan peluang bagi kelompok kepentingan untuk memasuki ranah politik Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan mereka.

Pemerintahan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Dwight D. Eisenhower, menyuarkan posisi Amerika Serikat

³⁵ Geoffrey R. Watson, "The Jerusalem Embassy Act of 1995," *Catholic University Law Review* 45 (1996), hal. 840.

³⁶ U.S. Congress, *Constitution of the United States: Amendment 1*, diakses pada 14 Februari 2025, [U.S. Constitution - First Amendment | Resources | Constitution Annotated | Congress.gov | Library of Congress](#)

³² *Ibid.* Hal. 79.

³³ *Ibid.* Hal. 80.

³⁴ *Ibid.*

yang tidak ingin ikut campur dalam urusan konflik kawasan Timur Tengah terutama pada konflik Israel yang menjadi ketakutan dan kebencian dari komunitas kebijakan luar negeri kala itu.³⁷

Pembatasan partisipasi Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik regional tersebut menjadikan tokoh penting di kelompok Yahudi, seperti Isaiah L. Kenen, Robert Asher, Edward Levy, Larry Weinberg, dan Mayer Mitchell mendirikan *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) untuk tetap menyelamatkan Israel. Pembentukan organisasi ini juga sebagai hasil dari kolaborasi antara tokoh politik Amerika Serikat dan pemimpin kelompok Yahudi yang sudah terjalin melalui lobi politik sejak tahun 1950. Melalui organisasi ini, orang-orang Yahudi Amerika dapat melakukan lobi sebagai konstruksi demokratik demi mempertahankan Israel, negara Yahudi tersebut.³⁸

AIPAC menjadi semakin agresif di tahun 1951, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Isaiah L. Kenen, direktur eksekutif pertama AIPAC, dalam mengambil alih minoritas populasi Yahudi di Amerika Serikat. AIPAC menjadi senjata politik utama kelompok Yahudi dan menjadi satu-satunya organisasi Yahudi yang terdaftar di Kongres Amerika Serikat untuk dapat melakukan lobi kepentingan mengenai pembuatan kebijakan dan

undang-undang terkait isu-isu Israel.³⁹ Keberhasilan AIPAC menjadi bukti hebatnya kemampuan kelompok Yahudi dalam meyakinkan masyarakat dan tokoh politik Amerika Serikat terkait Israel.

AIPAC menjadi komunitas lobi Yahudi Amerika satu-satunya yang terdaftar resmi sebagai organisasi domestik yang dapat melobi Kongres dan Cabang Eksekutif Amerika Serikat secara langsung di tahun 1959. Hal ini dikarenakan AIPAC merupakan organisasi Yahudi yang sumbangannya tidak bebas pajak, oleh karena itu AIPAC tidak memiliki batasan *Internal Revenue Service* yang berlaku untuk membela Israel, tidak seperti organisasi Yahudi lainnya yang memiliki batas larangan dalam praktik lobi secara langsung kepada Kongres dan Cabang Eksekutif Amerika Serikat.⁴⁰

Sebagai sebuah kelompok kepentingan Yahudi di Amerika Serikat, AIPAC memanfaatkan pengaruhnya sebagai kelompok lobi untuk mengedepankan kepentingan Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menyusun *draft* kebijakan pro-Israel dan mendekati anggota Kongres Amerika Serikat. Salah satu kepentingan yang di *briefing* oleh AIPAC kepada anggota Kongres Amerika Serikat adalah kebijakan pengakuan Amerika Serikat atas pemindahan ibu

³⁷ Steven L. Spiegel, "The American - Israel Relationship: Past and Future," *Israel Journal of Foreign Affairs* 2, no. 3 (2008), Hal 15-27.

³⁸ Svitlana Mykolaivna Busheva, "The Analysis of AIPAC as a Socio-Political Unit That Has Strong Impact on the Policy of the United States," *Scientific Journal "Politicus"*, no.1 (2019). Hal. 25.

³⁹ A. Setiawan, "Perkembangan Lobi Yahudi dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri dan Kongres Amerika Serikat," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 6, no. 2 (2004).

⁴⁰ Morris S. Salomon, "*The Agenda and Political Techniques of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*" (Executive Research Project, The Industrial College of the Armed Forces, National Defense University, 1993). hal. 4

kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dan juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

Rancangan kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem telah dirancang dan diperjuangkan AIPAC sejak tahun 1980 melalui praktik lobi yang menjadi ciri khas mereka, mendekati aktor legislatif, eksekutif dan membangun opini publik.⁴¹ Undang-Undang *Jerusalem Embassy Act* 1995 menjadi salah satu keberhasilan besar lobi Israel dalam pemerintahan Amerika Serikat. Akan tetapi, aktivitas lobi yang dilakukan AIPAC sejak masa pemerintahan Presiden Bill Clinton hingga Presiden Barack Obama tidak membawa hasil yang baik untuk implementasi pengakuan Yerusalem dan pemindahan Kedutaan Besar ke Yerusalem.

Dengan demikian, semakin mengakarnya lobi Israel di Amerika Serikat, Mearsheimer dan Walt mengatakan bahwa perkembangan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri telah dipengaruhi oleh lobi Israel, terutama pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.⁴²

Kelompok lobi Israel telah melakukan aktivitas melalui banyak jalur lobi seperti Kongres, Presiden dan cabang eksekutif Amerika Serikat, media, aktivis pro-Israel dan cakupan lainnya yang lebih luas. Hal

ini semakin terlihat dengan hasil kebijakan Amerika Serikat yang dikeluarkan semakin mengarah kepada keuntungan Israel dan bersifat bipartisan.⁴³

Pengaruh Kelompok Kristen Evangelikal dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Laporan sensus keagamaan Amerika Serikat tahun 2020 mencatat bahwa jemaat Kristen Evangelikal telah mendominasi sekitar 33,9% masyarakat beragama daripada komunitas keagamaan lainnya, dengan total jemaat 199.694 orang.⁴⁴ Gerakan evangelikal sebagai praktik penyebaran Injil di Amerika Serikat sangat berpengaruh dan membentuk masyarakat yang fanatik di wilayah-wilayah pedalaman Amerika Serikat, sehingga hal ini menjadikan mayoritas masyarakat di wilayah rural, urban, dan suburban, mengabdikan hidupnya sebagai penginjil karena hal tersebut dianggap sebagai inti dari kehidupan mereka sebagai orang Kristen.

Terjunnya kelompok Kristen Evangelikal dalam urusan sosial dan politik Amerika Serikat, kaum evangelikal mulai melakukan lobi kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung kepentingan Evangelikal sebagai gerakan keagamaan. Evangelikal percaya bahwa Alkitablah yang

⁴¹ Grant F. Smith, "The Israel Lobby's Role in the US Recognizing Jerusalem as Israel's Capital," *MintPress News*, diakses 14 Januari 2025, [The Israel Lobby's Role in US Recognition of Jerusalem as Israel's Capital](#)

⁴² John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy," *Middle East Policy* 13, no.3 (Fall 2006), hal. 62.

⁴³ Robert C. Lieberman, S. Mettler, T. B. Pepinsky, K. M. Roberts, dan R. Valelly, "The Trump Presidency and American Democracy: A Historical and Comparative Analysis," *Perspectives on Politics* 17, no.2 (2019), hal. 236.

⁴⁴ Clifford Grammich et al., 2020 *U.S. Religion Census: Religious Congregations & Adherents Study* (Association of Statisticians of American Religious Bodies, 2023), <https://www.usreligioncensus.org>.

menjadi penawar dalam berbagai isu dari segala bangsa.⁴⁵

Kelompok Kristen Evangelikal yang terjun ke dalam urusan sosial dan politik mulai memasuki partai-partai besar untuk mendapatkan peluang besar dalam mencapai kepentingan komunitas tersebut. Kelompok Kristen Evangelikal bergabung dengan partai republik karena dianggap sejalan dengan keyakinan komunitas. Dengan bergabungnya kelompok Kristen Evangelikal ke dalam partai dominan di Amerika Serikat menjadikan komunitas memiliki langkah besar dalam mempengaruhi pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik baik nasional maupun luar negeri yang sesuai dengan nilai-nilai injili evangelikal.⁴⁶

Evangelikal mempercayai fenomena-fenomena yang terjadi maupun yang telah diramalkan di dalam Alkitab, seperti halnya fenomena kedatangan Yesus kedua kalinya, sehingga untuk mencapainya Evangelikal mempercayai akan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi pertanda bahwa fenomena kedatangan Yesus kedua kalinya akan datang.⁴⁷ Dengan demikian setelah memasuki partai politik,

⁴⁵ Galen Carey, "Principles Before Politics," *National Association of Evangelicals*, diakses pada 14 Februari 2025, [Principles Before Politics | National Association of Evangelicals](#)

⁴⁶ Shuang Zhou, "American evangelical nationalism: history, status quo, and outlook," *International Journal of Anthropology and Ethnology* 7, no. 1 (2023).

⁴⁷ F. R. Pahlevi, M. Rasyidin, dan M. Hanura, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Sebagai Manifestasi Politik Domestik: Pengaruh Kelompok Evangelis Terhadap Perdamaian Palestina-Israel," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8, no.4 (2022).

kelompok Kristen Evangelikal mendorong peristiwa-peristiwa tertentu agar mencapai keselamatan yang abadi, termasuk mendukung Israel.

Sebagai bagian dari upaya penguatan misi penginjilan tersebut, kelompok Kristen Evangelikal menciptakan organisasi yang berfokus pada dukungan terhadap Israel dan orang-orang Yahudi. Di antara organisasi-organisasi ini adalah *Christian United for Israel* (CUFI), *My Faith Votes*, dan *American Christian Leaders for Israel* (ACLI). Organisasi-organisasi tersebut telah banyak melakukan praktik untuk membantu Israel.

Christian United for Israel (CUFI) merupakan organisasi kristen terbesar di Amerika Serikat yang berbasis untuk mendukung Israel yang didirikan oleh Pastor John Hagee di tahun 2006. CUFI memiliki pengaruh dalam melakukan tekanan politik kepada pemerintah Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negeri pro-Israel dengan membentuk opini publik dan jaringan aktivis nasional untuk mendukung dan melindungi Israel.⁴⁸

My Faith Votes merupakan organisasi yang mendorong keterlibatan aktif umat kristen dalam politik Amerika Serikat dengan menyebarkan kebenaran sesuai Alkitab yang didirikan oleh seorang pengacara, Sealy Yates, pada tahun 2015.⁴⁹

American Christian Leaders for Israel (ACLI) merupakan organisasi evangelikal yang telah

⁴⁸ Christians United for Israel, "Our Mission," CUFI, diakses 14 Februari 2025, [Our Mission | Christians United for Israel](#)

⁴⁹ My Faith Votes, "About," My Faith Votes, diakses 14 Februari 2025, [My Faith Votes | About](#)

didirikan lebih dari satu dekade melalui upaya kolektif pemimpin kristen dengan Dr. Susan Michael, direktur *International Christian Embassy Jerusalem* (ICEJ), sebagai tokoh kunci dari pendirian organisasi ini untuk memperkuat suara dukungan kepada Israel dan umat Yahudi dan menjadi organisasi payung bagi puluhan kelompok agar memperbesar pengaruh mereka dalam memperjuangkan Israel.⁵⁰

Dalam konteks Undang-Undang *Jerusalem Embassy Act* 1995, kelompok Kristen Evangelikal tetap melakukan aktivitas lobi meskipun mencapai kegagalan selama 22 tahun. Sebagai basis pemilih yang besar, Kembalinya dilakukan PEMILU Presiden Amerika Serikat ke- 45 di tahun 2016 menjadi jalan baru bagi kelompok lobi pro-Israel untuk bangkit dari kegagalan mereka mempengaruhi eksekutif merealisasikan pemindahan tersebut. Munculnya kandidat presiden dari Partai Republik membuka harapan bagi kelompok lobi tersebut akibat komitmen yang disuarakannya pada masa kampanye politik dilakukan.

Hubungan Donald Trump dengan AIPAC

Setelah menjadi salah satu kelompok lobi yang berpengaruh pada arus kebijakan luar negeri Amerika Serikat, AIPAC tetap melakukan strategi untuk dapat terus

mempengaruhi kebijakan pemerintahan Amerika Serikat. Strategi memberikan dukungan finansial kepada kandidat politik yang mau dan memberikan dukungannya kepada Israel masih dilakukan untuk dapat terus mempertahankan eksistensi lobi Israel di dalam pemerintahan Amerika Serikat.⁵¹

Setelah kepemimpinan Obama berakhir, terdapat beberapa kandidat politik lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2016, termasuk Donald J. Trump. Sebagai seorang pebisnis, Trump memiliki karakteristik yang melakukan pola pikir besar untuk mengejar hasil sebagai individu yang kompetitif. Mencalonkan diri menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat dalam PEMILU 2016, Trump memiliki strategi politik untuk mendapatkan basis pemilih yang besar meskipun tidak memiliki jejak politik apapun.⁵²

Selama kampanye PEMILU 2016 berlangsung, Trump melakukan interaksi dengan AIPAC, bahkan Trump diundang ke dalam agenda *AIPAC Policy Conference* pada 21 Maret 2016 di Washington DC, Amerika Serikat, dan melakukan pidato di depan para Yahudi Amerika dan aktivis pro-Israel. Di dalam pidatonya, Trump menyatakan perhatiannya kepada Israel dan memberikan janji kampanye untuk menjaga hubungan Amerika Serikat dan Israel sebagai pemimpin masa depan Amerika Serikat: *"I came here to speak to you about where I stand*

⁵⁰ Joel C. Rosenberg, "In Israel's darkest hour, Evangelical leaders huddle in DC to discuss how best to amplify their voice and policy impact to stand with Jewish state," *All Israel News*, 20 September 2024, diakses 14 Februari 2025, [In Israel's darkest hour, Evangelical leaders huddle in DC to discuss how best to amplify their voice and policy impact to stand with Jewish state | All Israel News](https://www.allisraelnews.com/news/in-israels-darkest-hour-evangelical-leaders-huddle-in-dc-to-discuss-how-best-to-amplify-their-voice-and-policy-impact-to-stand-with-jewish-state/)

⁵¹ Svitlana Mykolaivna Busheva, *Op. Cit.*

⁵² The White House, "Donald J. Trump," *Trump White House Archives*, diakses pada 23 Februari 2025, [Donald J. Trump – The White House](https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/23/donald-j-trump/)

on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the state of Israel."⁵³

Kedekatan Trump dengan AIPAC dan aktivis Yahudi semakin terjalin setelah penekanan dan ketegasan Trump untuk menjalin hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Israel. AIPAC cukup banyak membantu Trump dalam proses menuju kemenangannya dalam pemilu 2016, seperti bantuan dari Sheldon Adelson, seorang pengusaha dan donor politik terkemuka di Amerika Serikat yang berlatar belakang Yahudi sebanyak \$35 juta untuk memastikan bahwa kandidat yang pro-Israel akan mendapatkan kursi di pemerintahan.⁵⁴

Hubungan Donald Trump dengan Kelompok Kristen Evangelikal

Donald Trump merupakan kandidat presiden Amerika Serikat yang dicalonkan oleh Partai Republik. Sebagai partai yang dipengaruhi oleh kelompok Kristen Evangelikal, Trump sebagai kandidat membangun pendekatan untuk mendapat perhatian besar dari Kristen Evangelikal. Trump mendekati kelompok Kristen Evangelikal dengan janji kampanye miliknya yang mendukung kepentingan Kristen Evangelikal. Trump melakukan pola pendekatan yang sama dengan AIPAC, dimana Trump menjanjikan arus kebijakan Amerika Serikat akan mengarah pada

peruntungan Israel di bawah kepemimpinannya kelak.⁵⁵

Di dalam pertemuan yang diadakan pada 21 Juni 2016 di Hotel Marriott, New York City, Trump membangun citranya dalam mendapatkan suara kelompok Kristen Evangelikal untuk memenangkan dirinya dalam PEMILU 2016. Kristen Evangelikal.⁵⁶

Sikap skeptis yang ditunjukkan kelompok Kristen Evangelikal terhadap Trump di awal kemudian berubah menjadi dukungan kuat kepada kandidat presiden tersebut sebagai hasil dari suksesnya pertemuan tersebut berjalan. Kristen Evangelikal telah melihat Trump sebagai 'orang yang telah dikirim Tuhan' untuk membantu Kristen Evangelikal. Dan dimulai dari selesainya pertemuan tersebut, kelompok Kristen Evangelikal merupakan pendukung kuat dari Trump dalam pencalonannya menjadi presiden Amerika Serikat dalam PEMILU 2016.⁵⁷

Setelah pemilihan telah berlangsung, secara mengejutkan Trump mendapatkan kemenangan dengan meraih suara terbanyak elektoral, meskipun Clinton menjadi kandidat dengan suara populer terbanyak dalam PEMILU 2016.⁵⁸ Pemungutan suara mencatatkan hasil yang di dapat antara kedua kandidat, dimana 306 suara elektoral berhasil diraih Trump yang dibanding dengan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Courtney Kennedy et al., "An evaluation of the 2016 election polls in the United States," *Public Opinion Quarterly* 82, no.1 (2018).

⁵³ JTA. "Donald Trump's Full Speech to AIPAC," *Op. Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

perolehan Clinton yang hanya berjumlah 227 suara elektoral.⁵⁹

Oleh sebab itu, kemenangan yang diraih Trump pada PEMILU 2016 tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar kelompok Kristen Evangelikal dan lobi AIPAC. Dengan demikian, hal ini menjadikan kemenangan Trump merupakan langkah perpanjangan dari upaya lobi pro-Israel untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Israel.

Politik Luar Negeri Amerika Serikat dibawah Kepemimpinan Donald Trump

Di Amerika Serikat, dalam proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh politik domestik dimana terdapat dinamika dari presiden dan Kongres, partai politik, kelompok kepentingan, dan opini publik.⁶⁰ Hal ini menjadikan dinamika dalam pengambilan keputusan yang cukup kompleks dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Politik domestik Amerika Serikat telah dipengaruhi secara signifikan dengan kelompok konservatif dan pendukungnya, terutama kelompok agama seperti Kristen Kristen Evangelikal, yang berperan dalam pengambilan keputusan selama pemerintahan Trump.⁶¹

⁵⁹ Federal Election Commission, *Election Results for the US President, the US Senate and the US House of Representatives* (2017).

⁶⁰ Hasbi Aswar, "The U.S. Foreign Policy under Trump Administration to Recognize Jerusalem as the State Capital of Israel," *Nation State: Journal of International Studies* 1, no. 2 (Desember 2018): 133.

⁶¹ Guthrie Graves-Fitzsimmons dan Maggie Siddiqi, "Trump Administration Harmed Faith Communities," *American Progress*, 21 September 2020, [How the Trump](#)

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah, terlihat pergerakan pendekatan yang asertif Amerika Serikat ke negara kawasan Timur Tengah untuk melawan pengaruh Iran guna mempertahankan stabilitas ekonomi Amerika Serikat di panggung global. Perubahan tatanan politik Timur Tengah ini tentu menjadi panggung besar bagi Amerika Serikat untuk mengambil tindakan menguasai wilayah Timur Tengah. Pendekatan tersebut sangat terlihat jelas dalam hubungan Amerika Serikat yang dilakukan Presiden Trump dengan Israel.⁶²

Dalam konteks pengakuan Yerusalem dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat, terdapat tiga orang yang paling berperan dalam mempengaruhi Presiden Trump dalam mengupayakan realisasi pengakuan kebijakan terhadap Yerusalem, yakni menantu Presiden Trump sekaligus penasihat senior presiden, Jared Kushner, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman. Ketiga tokoh tersebut telah dipilih Presiden Trump untuk menjadi penasihat dalam mengeluarkan kebijakan untuk Israel. Tokoh-tokoh tersebut juga merupakan penganut Yahudi Ortodoks yang menjadi pendukung kuat Israel.⁶³

[Administration Has Harmed Faith Communities - Center for American Progress](#)

⁶² Agra Haydar Allam, "Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Presiden Donald Trump untuk Mengakui Status Kota Yerusalem sebagai Ibukota Israel," *Journal of International Relations* 5, no.2 (2019): 443.

⁶³ *Ibid*, hal. 445.

Sebagai penasihat senior dan sekaligus menantu Presiden Trump, Jared Kushner telah memimpin sebuah tim kecil untuk melakukan negosiasi di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk strategi diplomatik Amerika Serikat terhadap konflik Israel dan Palestina. Dengan latar belakang pribadi sebagai seorang Yahudi Zionis, Kushner menilai bahwa mengakui Yerusalem adalah milik Israel merupakan sebuah keharusan yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah meskipun memiliki resiko buruk yang tinggi.⁶⁴

David Friedman, seorang pengacara Zionis yang menjadi pendukung kuat pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang dipilih Presiden Trump menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel sebagai bukti komitmen Presiden Trump terhadap Israel. Friedman dan Kushner telah bekerja sama untuk menata pendekatan Amerika Serikat dalam memandang konflik Israel dan Palestina.⁶⁵

Jason Greenblatt, seorang pengacara di bawah naungan perusahaan Trump yang dipilih sebagai utusan khusus negosiasi internasional, Greenblatt berperan untuk membuka dialog dengan pemimpin-pemimpin di kawasan Timur Tengah dan tetap mempertahankan peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian

⁶⁴ NDTV, *Jared Kushner Sets Stage for Donald Trump's Jerusalem Decision*, 4 Desember 2017, diakses pada 19 Maret 2025, [Jared Kushner Sets Stage For Donald Trump's Jerusalem Decision](#)

⁶⁵ Abdullah Al-Arian, "Keputusan Trump: Kisah di Baliknya dan Akibatnya di Masa Depan," *Anadolu Agency*, 12 Desember 2017, diakses pada 20 Maret 2025, [Keputusan Trump: Kisah di baliknya dan akibatnya di masa depan](#)

dalam konflik di Timur Tengah. Faktor-faktor seperti ketakutan atas agresi Iran, upaya diversifikasi ekonomi di luar minyak, mampu memungkinkan negara-negara Teluk dapat memandang Israel sebagai mitra potensial yang dapat menjangkau stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut.⁶⁶

Setelah di dorong oleh kelompok pembuat kebijakan mengenai Israel dan status Yerusalem, dikeluarkanlah Proklamasi 9683, tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.⁶⁷ Proklamasi ini dilaksanakan dalam bentuk pidato kenegaraan di Gedung Putih, Washington DC, pada 6 Desember 2017.

Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem kemudian dipersiapkan sesuai dengan instruksi Presiden Trump kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan tetap pada prioritas melayani warga negara Amerika Serikat di wilayah tersebut. Pemindahan Kedutaan Besar ini akan menjadi terobosan baru dalam

⁶⁶ Marilyn Stern, "Jason Greenblatt: Why Trump's Middle East Diplomacy Succeeded," *Middle East Forum*, 5 Agustus 2022, diakses pada 20 Maret 2025, [Jason Greenblatt: Why Trump's Middle East Diplomacy Succeeded - Middle East Forum](#)

⁶⁷ Gerhard Peters and John T. Wooley, "Proclamation 9683 - Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem," 6 Desember 2017, *The American Presidency Project*, diakses pada 25 Februari 2025, [Proclamation 9683—Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem | The American Presidency Project](#)

melambangkan perdamaian.⁶⁸ Masa waktu yang diberikan untuk proses pemindahan ini dimulai dari dikeluarkannya proklamasi tersebut, yakni 6 Desember 2017 sampai dengan Mei 2018.

Meskipun mendapat kecaman dalam kebijakan tersebut, Amerika Serikat tetap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tetap memindahkan Kedutaan Besar untuk Israel dari tel Aviv ke Yerusalem. Setelah persiapan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selesai, Kedutaan Besar yang berkawasan di Arnona ini kemudian diresmikan oleh Amerika Serikat di 14 Mei 2018 dimana kegiatan tersebut bertepatan dengan hari kemerdekaan Israel yang ke-70 tahun.⁶⁹

Analisis Kebijakan Luar Negeri Presiden Donald Trump Terhadap Israel

Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel dan Timur Tengah, kelompok lobi pro-Israel memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tersebut. AIPAC dan kelompok Kristen Kristen Evangelikal sebagai kelompok lobi pro-Israel, telah menjadi kelompok lobi partisipan aktif yang melakukan aktivitas kontak langsung dengan pejabat publik. Kelompok pro-Israel ini telah banyak mempengaruhi aktivitas legislatif dan eksekutif dalam mengupayakan kepentingan mereka terhadap Israel dan kawasan Timur Tengah, yang menjadikan arah

kebijakan luar negeri Amerika Serikat fokus terhadap Israel.⁷⁰

Pada masa PEMILU 2016, terjadi hubungan transaksional yang dilakukan antara Presiden Trump sebagai kandidat politik dengan kelompok Kristen Kristen Evangelikal yang memiliki blok suara yang besar sebagai basis pemilih pada saat sesi tertutup di hotel Marriott, New York City pada 21 Juni 2016, dimana Presiden Trump menjanjikan bahwa arus kebijakan Amerika Serikat akan fokus kepada Israel.⁷¹

Pada masa awal pemerintahan Presiden Donald Trump, AIPAC terdata dalam empat kuartal banyak melakukan aktivitas lobi kepada pemerintahan Amerika Serikat mengenai isu Israel dan Timur Tengah. Seperti di Kuartal ketiga, AIPAC melobi *House of Representative* dan Senat Amerika Serikat terkait bantuan dana militer luar negeri tahunan Amerika Serikat yang masuk ke anggaran urusan internasional Amerika Serikat untuk Israel dan pembahasan terkait Undang-Undang Anti-Aktivitas Destabilisasi Iran tahun 2017 dan Undang-Undang Sanksi Perlawanan Musuh Amerika.⁷²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AIPAC dan kelompok Kristen Kristen Evangelikal telah memiliki peran strategis untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terkhusus kebijakan terhadap Timur Tengah dan Israel, dengan aktivitas lobi yang insentif.

⁶⁸ U.S. Department of State, "Recognizing Jerusalem As Israel's Capital," *Op. Cit.*

⁶⁹ U.S. Mission Israel, "Opening of U.S. Embassy Jerusalem," *Op. Cit.*

⁷⁰ John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, *Op. Cit.*

⁷¹ J. D. Lemons, *Op. Cit.*

⁷² U.S. House of Representative, office of Clerk, "Lobbying Disclosure Act Quarterly Report: AIPAC," Quarter 3 2017.

Keberhasilan lobi yang dilakukan kepada pejabat legislatif dan eksekutif terhadap bantuan militer dan kebijakan sanksi terhadap Iran cukup menjelaskan bagaimana efektivitas AIPAC dan kelompok Kristen Kristen Evangelikal sebagai kelompok lobi domestik yang berpengaruh dalam politik luar negeri Amerika Serikat.

Kemudian kelompok kecil yang dibentuk oleh Presiden Trump untuk membuat kebijakan terhadap Israel yang diisi oleh orang terdekat Presiden Trump juga dapat menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat pro-Israel ditimbang mengambil langkah aman terhadap konflik Israel dan Palestina tersebut. Dengan banyak pendekatan yang dilakukan dalam proses pembuatan tersebut menjadikan keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat kuat dan tidak terbantahkan seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Trump dalam konferensi dengan Perdana Menteri Israel di Swiss tersebut.⁷³

Kebijakan Amerika Serikat dengan prinsip *America First* juga dapat terlihat mengarah kepada Israel pada saat pidato perwakilan tetap Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley, pada pemungutan suara pengecaman kebijakan Amerika Serikat terhadap pengakuan Yerusalem dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem.⁷⁴ Haley menyatakan bahwa Amerika Serikat

akan tetap melakukan keputusan mereka sesuai dengan keinginan rakyat Amerika Serikat, hal ini dapat dinilai bahwa pengaruh kelompok lobi domestik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat sebagai keinginan rakyat Amerika Serikat terhadap sikap pemerintahan atas Israel.

Namun, bukan berarti kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel merupakan kebijakan luar negeri berbasis agama, hanya saja kebijakan tersebut didukung oleh kelompok kepentingan agama. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tetap mempertimbangkan kebijakan yang menyesuaikan geopolitik, keamanan nasional, dan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian bagi pejabat tinggi pemerintahan, basis pemilih menjadi acuan yang penting bagi karir politik dan Presiden Trump memiliki basis pemilih yang besar dari kelompok Kristen Kristen Evangelikal dan bantuan dana kampanye yang besar dari AIPAC. Oleh sebab itu kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Israel mengenai Yerusalem merupakan pemenuhan janji kampanye.⁷⁵

Kebijakan terhadap Israel juga telah dilakukan perencanaan yang telah disesuaikan bersama kelompok kecil pembuat kebijakan untuk tetap mempertahankan posisi Amerika Serikat di panggung Timur Tengah, seperti yang telah dikatakan Jason Greenblatt, di dalam wawancaranya terhadap politik Presiden Trump.⁷⁶ Dengan demikian,

⁷³ Mouin Rabbani, "U.S. Policy on Jerusalem," *Institute for Palestine Studies*, 03 Juni 2019, [US Policy on Jerusalem, 1948-2017 | Institute for Palestine Studies](https://www.ipsweb.org/2019/06/03/us-policy-on-jerusalem-1948-2017/)

⁷⁴ BBC News, *Jerusalem: Trump Move Prompts Negative World Reaction*, 21 Desember 2017, [Jerusalem: UN resolution rejects Trump's declaration](https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42481241)

⁷⁵ Célia Belin, "Trump's Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics," *Brookings*, 15 Desember 2017, diakses pada 26 Maret 2025, [Trump's Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics](https://www.brookings.edu/blog/foreign-views/2017/12/15/trumps-jerusalem-decision-is-a-victory-for-evangelical-politics/)

⁷⁶ Marilyn Stern, *Op. Cit.*

dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel bukan merupakan kebijakan yang didasarkan pada aktivitas keagamaan, akan tetapi kebijakan ini telah dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dengan pemenuhan hubungan transaksional antara pejabat publik dan basis pemilih.

D. KESIMPULAN

Pengakuan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 atas Yerusalem telah menciptakan bias dari komitmen Amerika Serikat untuk membawa perdamaian yang adil. Namun, tekanan politik domestik yang terjadi akibat kelompok lobi Israel yang kuat dan besar mengakibatkan kompleksitas dari kebijakan tersebut. Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem pada tahun 2018 juga telah menjelaskan keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel di masa kepemimpinan Presiden Trump.

Dukungan politik dari basis pemilih memainkan peran penting dalam dinamika politik domestik Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat memiliki prinsip sekularisme, kelompok-kelompok berbasis agama seperti Kristen Evangelikal tetap memiliki pengaruh yang besar dalam proses politik. Presiden Trump, sebagai seorang politisi, memahami pentingnya menjaga hubungan dengan kelompok dengan basis suara yang besar demi kepentingan elektoralnya.

Oleh karena itu, dukungan besar dari AIPAC dan kelompok Kristen Evangelikal menjadikan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Trump memberikan fokus terhadap Israel akibat sejalan dengan kepentingan

kelompok-kelompok tersebut, yang merupakan basis pemilih Presiden Trump.

Dalam konteks kebijakan terhadap Israel, terkhusus mengenai Yerusalem, langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Trump bukan merupakan kebijakan luar negeri berbasis agama, akan tetapi kebijakan tersebut merupakan hasil dari hubungan transaksional Presiden Trump dengan basis pemilihnya, yang dimana merupakan kelompok kepentingan berbasis agama. Selain itu, peran para penasihat dekat Presiden Trump juga berkontribusi dalam membentuk kebijakan luar negeri yang mendukung Israel, dimana para penasihat dekat Presiden Trump merupakan seorang Yahudi dan pendukung Zionis.

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan bentuk nyata dari pemenuhan janji politik yang telah dibangun karena adanya hubungan transaksional dengan kelompok kepentingan tersebut yang menjadi basis pemilih tersebut.

Kesimpulannya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump, terkhusus terkait Israel dan Yerusalem merupakan hasil dari kombinasi faktor politik domestik dan strategi geopolitik. Meskipun kebijakan luar negeri tersebut menuai kritik internasional, Amerika Serikat tetap berpegang pada kebijakan yang dianggap menguntungkan kepentingan nasionalnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Yerusalem ini menunjukkan bagaimana dinamika politik domestik yang dipengaruhi

oleh kelompok lobi dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, terutama dalam menjaga posisi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel tidak hanya didorong oleh faktor diplomasi dan keamanan, tetapi juga oleh dinamika politik domestik yang berperan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, A. "Perkembangan Lobi Yahudi dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri dan Kongres Amerika Serikat," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 6, no. 2 (2004).
- Al-Arian, Abdullah. "Keputusan Trump: Kisah di BalikNya dan Akibatnya di Masa Depan," *Anadolu Agency*, 12 Desember 2017, [Keputusan Trump: Kisah di balikNya dan akibatnya di masa depan](#)
- Allam, Agra Haydar. "Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Presiden Donald Trump untuk Mengakui Status Kota Yerusalem sebagai Ibukota Israel," *Journal of International Relations* 5, no.2 (2019)
- Agreement Between the United States of America and Israel Concerning Energy Cooperation*, ditandatangani 22 Februari 2000, T.I.A.S. 01-501, Department of Energy of the United States of America.
- Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Government of Israel and the Government of the United States of America*, berlaku tanggal 19 Agustus 1988, Article 1, United States Trade Representative.
- Al Jazeera, "World Leaders React to US Embassy Relocation to Jerusalem," *Al Jazeera*, 14 Mei 2018, [World leaders react to US embassy relocation to Jerusalem | Donald Trump News | Al Jazeera](#)
- Aswar, Hasbi. "The U.S. Foreign Policy under Trump Administration to Recognize Jerusalem as the State Capital of Israel," *Nation State: Journal of International Studies* 1, no. 2 (Desember 2018).
- Belin, Célia. "Trump's Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics," *Brookings*, 15 Desember 2017, [Trump's Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics](#)
- BBC News, *Jerusalem: Trump Move Prompts Negative World Reaction*, 21 Desember 2017, [Jerusalem: UN resolution rejects Trump's declaration](#)
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Quantitative Research Method," *Quantitative Research Journal* 9, no.2 (2009).
- Busheva, Svitlana Mykolaivna. "The Analysis of AIPAC as a Socio-Political Unit That Has Strong Impact on the Policy of the United States," *Scientific Journal "Politicus"*, no.1 (2019).
- Carey, Galen. "Principles Before Politics," *National Association of Evangelicals*, [Principles Before Politics | National Association of Evangelicals](#)
- Christians United for Israel, "Our Mission," CUFI, [Our Mission | Christians United for Israel](#)
- Cordesman, Anthony H. *Arms Sales, Arms Control, and Regional*

- Security in the Middle East* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2001).
- Crowley, Michael. "Full text: Trump Values Voter Summit Remarks," *Politico*, 9 September 2016, [Full text: Trump Values Voter Summit remarks - POLITICO](#)
- Federal Election Commission, *Election Results for the US President, the US Senate and the US House of Representatives* (2017).
- Grammich, Clifford, et al., *2020 U.S. Religion Census: Religious Congregations & Adherents Study* (Association of Statisticians of American Religious Bodies, 2023), <https://www.usreligioncensus.org>.
- Graves-Fitzsimmons, Guthrie, Maggie Siddiqi, "Trump Administration Harmed Faith Communities," *American Progress*, 21 September 2020, [How the Trump Administration Has Harmed Faith Communities - Center for American Progress](#)
- Hadžić, Faruk. "Space and Place of Jerusalem; Sociology of Religion and Inter-Cultural Sociopolitical Peace and Conflict." *Journal of Islamicjerusalem Studies* 22, no.1 (July 2022), <https://doi.org/10.31456/beytulm akdis.1036835>.
- JTA, "Donald Trump's Full Speech to AIPAC," *The Times of Israel*, 21 Maret 2016, [Full text of Donald Trump's speech to AIPAC | The Times of Israel](#)
- Kennedy, Courtney, et al., "An evaluation of the 2016 election polls in the United States," *Public Opinion Quarterly* 82, no.1 (2018).
- Lemons, J. D. "The Room Where It Happened: How Evangelical Leaders Used a Closed-Door Meeting to Change Sentiment for Donald Trump J. Trump," *The Australian Journal of Anthropology* 33, no.3 (2022).
- Library of Congress, *Jerusalem Embassy Act of 1995*, Public Law 104-45, 109 Stat. 398-401 (8 November 1995).
- Lieberman, Robert C., S. Mettler, T. B. Pepinsky, K. M. Roberts, dan R. Valelly, "The Trump Presidency and American Democracy: A Historical and Comparative Analysis," *Perspectives on Politics* 17, no.2 (2019).
- Lindsay, James M. "What's At Stake With The U.S. Recognition Of Jerusalem," *Council on Foreign Relations*, [What's At Stake With the U.S. Recognition of Jerusalem | Council on Foreign Relations \(cfr.org\)](#)
- Mandate for Palestine*, Liga Bangsa-Bangsa (1992).
- Mark, Clyde R. *Israel: US Foreign Assistance* (Congressional Research Service, Library of Congress, Agustus 2003).
- Mearsheimer, John J., Stephen M. Walt, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy," *Middle East Policy* 13, no.3 (Fall 2006)
- Memorandum of Understanding Between the Governments of the United States and Israel on Strategic Cooperation*, Israel Ministry of Foreign Affairs, 30 November 1981.
- MIFTAH, "The controversy for US foreign aid to Israel, 20 Mei 2002, [MIFTAH - US foreign aid to Israel](#)

- My Faith Votes, “About,” My Faith Votes, [My Faith Votes | About](#)
- NDTV, *Jared Kushner Sets Stage for Donald Trump’s Jerusalem Decision*, 4 Desember 2017, [Jared Kushner Sets Stage For Donald Trump's Jerusalem Decision](#)
- Pahlevi, F. R. M. Rasyidin, dan M. Hanura, “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Sebagai Manifestasi Politik Domestik: Pengaruh Kelompok Evangelis Terhadap Perdamaian Palestina-Israel,” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8, no.4 (2022).
- Peters, Gerhard, John T. Wooley, “Proclamation 9683 - Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem,” *The American Presidency Project*, 6 Desember 2017. [Proclamation 9683— Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem | The American Presidency Project](#)
- Rabbani, Mouin. “U.S. Policy on Jerusalem,” *Institute for Palestine Studies*, 03 Juni 2019, [US Policy on Jerusalem, 1948-2017 | Institute for Palestine Studies](#)
- Rempel, Terry. “The Significance of Israel’s Partial Annexation of East Jerusalem.” *The Middle East Journal* (1997).
- Rosenberg, Joel C. “In Israel’s darkest hour, Evangelical leaders huddle in DC to discuss how best to amplify their voice and policy impact to stand with Jewish state,” *All Israel News*, 20 September 2024, [In Israel’s darkest hour, Evangelical leaders huddle in DC to discuss how best to amplify their voice and policy impact to stand with Jewish state | All Israel News](#)
- Salomon, Morris S. “*The Agenda and Political Techniques of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*” (Executive Research Project, The Industrial College of the Armed Forces, National Defense University, 1993).
- Sawyer, W. Charles, Richard L. Sprinkle, “U.S.-Israel Free Trade Area: Trade Expansion Effects of the Agreement,” *Journal of World Trade* 20, no.5 (Oktober 1986).
- Sharp, Jeremy M. U.S. Foreign Aid to Israel,” *Congressional Research Service, Library of Congress*, April 2013.
- Sharp, Jeremy M. U.S. Foreign Aid to Israel,” *Congressional Research Service, Library of Congress*, Juni 2015.
- Sharp, Jeremy M. U.S. Foreign Aid to Israel,” *Congressional Research Service, Library of Congress*, Maret 2023.
- Slonim, Shlomo, Geoffrey Watson, *Jerusalem’s Status and the Evolution of U.S. Policy* (Washington, D.C: The Washington Institute for Near East Policy, 1997).
- Smith, Grant F. “The Israel Lobby’s Role in the US Recognizing Jerusalem as Israel’s Capital,” *MintPress News*, [The Israel Lobby's Role in US Recognition of Jerusalem as Israel's Capital](#)
- Stein, Kenneth W. *US-Israeli Relations 1947-2010: The View from Washington*, in *The World Facing Israel-Israel Facing the*

- World: Images and Politics* (Berlin: Frank and Timme, 2011).
- Stern, Marilyn. "Jason Greenblatt: Why Trump's Middle East Diplomacy Succeeded," *Middle East Forum*, 5 Agustus 2022, [Jason Greenblatt: Why Trump's Middle East Diplomacy Succeeded - Middle East Forum](#)
- Soleimani, Fatih. "The Oslo Agreement: A Study of the Conflict Peace Process Arabic-Israel," *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020).
- Spiegel, Steven L. "The American - Israel Relationship: Past and Future," *Israel Journal of Foreign Affairs* 2, no. 3 (2008).
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (2005).
- The Partition Plan*, United Nations General Assembly Resolution 181 (November 29, 1947).
- The Status of Jerusalem*, prepared under the guidance of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (New York: United Nations, 1997).
- The White House, "Donald J. Trump," *Trump White House Archives*, [Donald J. Trump - The White House](#)
- Truman Presidential Museum & Library, "Recognition of Israel," *National Archives and Records Administration*, [Recognition of Israel | Harry S. Truman](#)
- U.S. Congress, *Constitution of the United States: Amendment 1*, [U.S. Constitution - First Amendment | Resources | Constitution Annotated | Congress.gov | Library of Congress](#)
- U.S. Department Of State, *Foreign Relations of the United States, 1948, the Near East, South Asia, and Africa, Volume V, Part 2* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1948).
- U.S. Department of State, *Recognizing Jerusalem as Israel's Capital*, 7 Desember 2017, [Recognizing Jerusalem as Israel's Capital - United States Department of State](#)
- U.S. House of Representative, office of Clerk, "Lobbying Disclosure Act Quarterly Report: AIPAC," Quarter 3 2017.
- U.S. Mission Israel, "Opening of U.S. Embassy Jerusalem," U.S. Embassy in Israel, 23 Februari 2018, [Opening of U.S. Embassy Jerusalem - U.S. Embassy in Israel](#)
- Watson, Geoffrey R. "The Jerusalem Embassy Act of 1995," *Catholic University Law Review* 45 (1996).
- Zhou, Shuang. "American evangelical nationalism: history, status quo, and outlook," *International Journal of Anthropology and Ethnology* 7, no. 1 (2023).